

DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Indonesian Economic Development Disparity

Ratna Christianingrum

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id

Abstract

This study aims to examine the pattern and economic structure of provinces in Indonesia using the Klassen typology. This study also aims to describe the level of inequality of provinces in Indonesia using the Williamson Index. This study used GDP from all provinces in Indonesia in 2018-2020. This study shows that most provinces in Indonesia are classified as high income and low growth. During the pandemic, there were several provinces that were classified as low income and low growth provinces. The tertiary sector is the support of the economy in these provinces. This is due to changes in consumption patterns and a decrease in purchasing power during the pandemic. The concentration of regional economic activity and investment is the cause of high inequality in Indonesia.

Keywords: Inequality, Economy Structure, Williamson Index

1. Pendahuluan

Dewan Pembangunan Ekonomi Amerika (American Economic Development Council/AEDC) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan kemakmuran melalui mobilisasi sumber-sumber daya manusia, finansial, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan (Last, 2007). Masalah pembangunan ekonomi di suatu daerah tergantung dari banyak faktor. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya sistem otonomi daerah di Indonesia. Pemberlakuan sistem otonomi daerah menyebabkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai bidang. Penerapan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi dan efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek *multiplier* dari

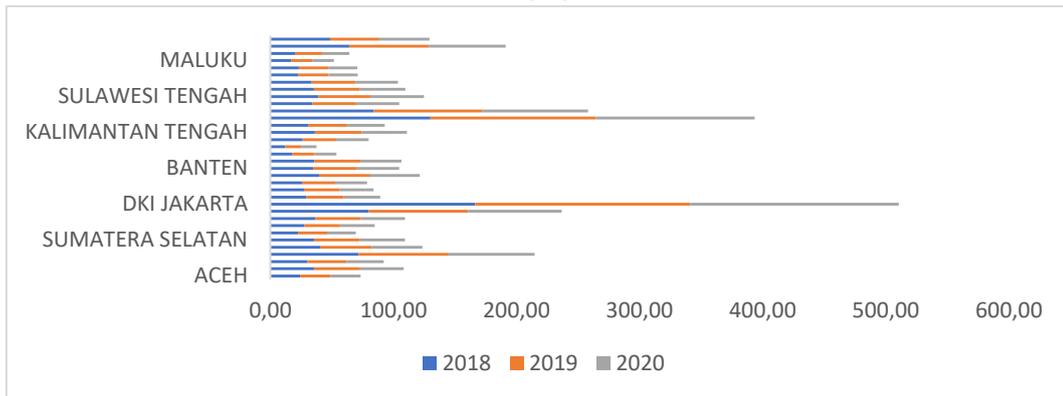
desentralisasi (Khusaini, 2006). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi *vertical (center region)* dan *horizontal (region-region) imbalances* antardaerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sebelum era otonomi daerah, harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak sendiri sangat sulit untuk dilakukan. Sebelum berlakunya otonomi daerah, ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat cukup tinggi. Hal ini sebagai wujud ketidakberdayaan PAD dalam membiayai belanja daerah. Namun setelah otonomi daerah berjalan selama dua dekade, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah daerah masih tinggi. Kontribusi PAD terhadap APBD hanya sekitar 12,87 persen (Nugraha, 2019).

Menurut Todaro (2000), tujuan dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Sehingga salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Tikson, 2005). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat di daerah tersebut (Thamrin, 2001). Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Gambar 1 menunjukkan perkembangan pendapatan rata-rata per kapita di masing-masing provinsi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 7 provinsi yang memiliki pendapatan rata-rata per kapita di atas rata-rata pendapatan per kapita secara nasional. Jumlah ini mengalami perbaikan, dimana 2 tahun sebelumnya hanya 6 provinsi yang memiliki pendapatan rata-rata per kapita di atas rata-rata pendapatan per kapita secara nasional. Provinsi yang mengalami peningkatan pendapatan rata-rata per kapita ialah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedikitnya jumlah provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata pendapatan per kapita nasional dapat mengindikasikan bahwa masih belum meratanya pembangunan di Indonesia.

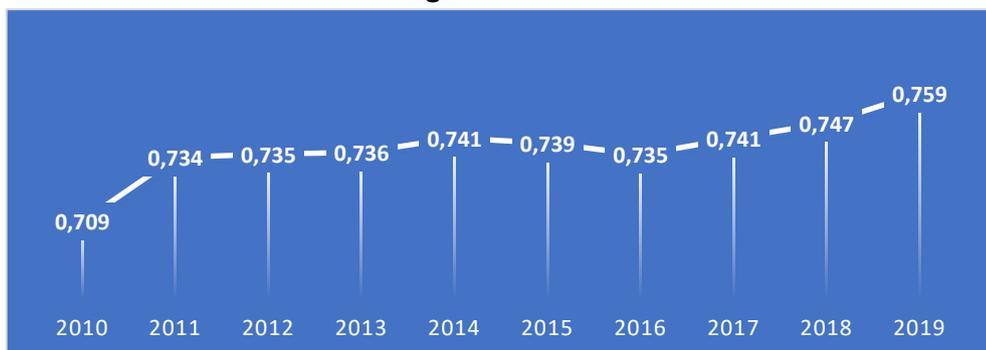
Gambar 1. PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: BPS (diolah)

Menurut Putong (2010), salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ialah Indeks Williamson. Dengan menggunakan Indeks Williamson, dapat dilihat bahwa ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih tinggi. Gambar 2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2019, Indeks Williamson di Indonesia selalu di atas 0,7. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia berada dalam kategori tinggi. Tingginya ketimpangan di Indonesia dapat mengindikasikan belum meratanya pembangunan yang dilakukan

Gambar 2. Perkembangan Indeks Williamson Indonesia



Sumber: Hasil Olahan Penelitian

Tingginya tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia belum tercapai. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi ialah mengurangi ketimpangan (Todaro, 2000). Di sisi lain, penerapan otonomi daerah seharusnya memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. Seharusnya, pelaksanaan otonomi daerah mempermudah pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini akan menganalisis pola dan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan tipologi *Klassen* beserta ketimpangan pembangunan yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula (Arsyad, 2010). Perbedaan tingkat pembangunan antardaerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengenai dampak balik pada suatu daerah.

2.2. Ukuran Ketimpangan Wilayah

Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan antar wilayah yang pada mulanya digunakan dalam penelitian Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Walaupun indeks ini mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun indeks ini cukup lazim digunakan untuk mengukur pembangunan antarwilayah. Apabila *Gini Ratio* dipergunakan untuk mengukur distribusi pendapatan, Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal ini dikarenakan yang diperbandingkan dalam Indeks Williamson merupakan tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat kemakmuran antarkelompok (Sjafrizal, 2012).

2.3. Investasi dan Disparitas Daerah

Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya pada daerah-daerah tertentu akan menyebabkan adanya ketimpangan. Menurut Mankiw (2006), investasi adalah komponen PDB yang mengkaitkan masa kini dan masa depan. Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut: (a) investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi; (b) investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan; (c) investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang menyebabkan kemajuan yang tidak merata antardaerah (Sultan & Jamzani, 2010). Di Indonesia, dimana wilayahnya terdiri atas kepulauan, menyebabkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah pusat pemerintahan dan pertumbuhan. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah, perbedaan sumber daya alam (SDA) antarwilayah, perbedaan kondisi geografis, dan kurang lancarnya perdangan antarprovinsi.

Teori Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses *multiplier*) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Dalam teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 2010), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kurangnya investasi di suatu wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dan terpusatnya investasi di suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan distribusi investasi. Hal ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2018, 2019, dan 2020. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan, jumlah penduduk, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), dan belanja pembangunan. Data PRDB, jumlah penduduk, dan realisasi investasi, baik PMDN ataupun PMA, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan besaran belanja pembangunan diperoleh dari data realisasi APBD di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisa pola dan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan untuk melihat pola dan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia adalah tipologi *Klassen*. Analisis dalam tipologi *Klassen* ialah mengklasifikasikan daerah ke dalam empat kelompok berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per provinsi dan pendapatan per kapita.

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan \ PDRB per kapita	ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
	rdi > rni (+)	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat
rdi < rni (-)	(II) Daerah maju tapi tertekan	(IV) Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal (2012)

Keterangan:

rdi = laju pertumbuhan provinsi *i*

rni = laju pertumbuhan ekonomi nasional

ydi = PDRB per kapita provinsi *i*

yni = PDB per kapita nasional

Daerah-daerah yang berada di kuadran I merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*). Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah, dalam hal ini provinsi, yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Daerah-daerah yang berada di kuadran II merupakan daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Daerah maju tapi tertekan merupakan provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, namun tingkat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan nasional. Sedangkan daerah-daerah dalam kuadran III ialah daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Daerah berkembang cepat adalah provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Sedangkan daerah dalam kuadran IV merupakan daerah relatif tertinggal (*low growth and slow income*). Daerah relatif tertinggal adalah provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antar provinsi di Indonesia adalah Indeks Williamson. Adapun formulasi indeks Williamson adalah sebagai berikut.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB per kapita di kabupaten i

\bar{Y} = PDRB rata-rata per kapita di provinsi

f_i = jumlah penduduk kabupaten i

n = jumlah penduduk provinsi

Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar dan sama dengan 0 (nol). Secara ekstrim, jika angka indeks sama 0 (nol) maka menandakan tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya ketimpangan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonominya (Sutarno & Kuncoro M., 2003). Sebagai panduan, dapat digunakan kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut:

- a. jika $IW < 0,35$ maka tingkat ketimpangan termasuk ringan;
- b. jika $0,35 < IW < 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk sedang;
- c. jika $IW > 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk berat.

4. Pembahasan

4.1. Pola dan Struktur Ekonomi Provinsi di Indonesia

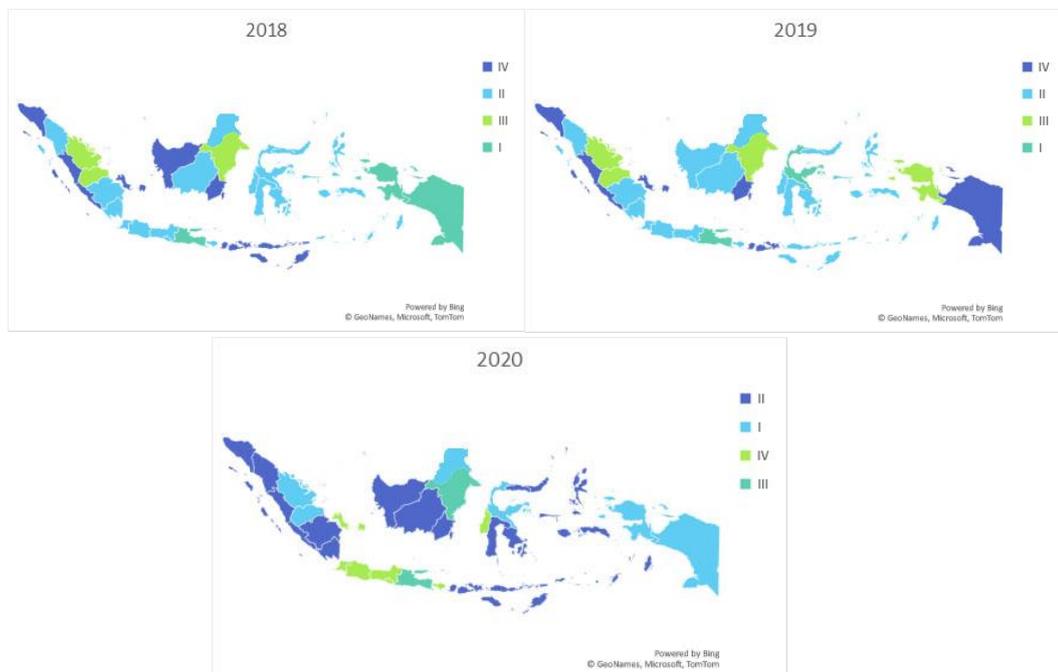
Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan pola dan struktur ekonominya. Adapun provinsi-provinsi di Indonesia dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu provinsi yang maju dan cepat bertumbuh, provinsi berkembang cepat namun tidak maju, provinsi maju namun tertekan dan provinsi tertinggal. Dengan menggunakan data pada tahun 2018 hingga 2020, diperoleh bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang terus maju dan mengalami pertumbuhan. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi tertinggal selama 3 tahun terakhir.

Provinsi Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berada dalam kategori maju dan bertumbuh selama tiga tahun berturut-turut. Apabila dilihat dari sektor penopang PDRB, maka diperoleh bahwa Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor penopang PDRB terbesar dengan kontribusi sektor ini selalu lebih dari 25 persen (BPS, 2021). Selain Pertambangan dan Penggalan, sektor penopang PDRB Provinsi Kalimantan Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 16 persen). Sedangkan kontribusi sektor Konstruksi terhadap PDRB rata-rata sebesar 13,6 persen. Namun sektor yang mengalami pertumbuhan selama 3 tahun terakhir adalah sektor Pengadaan Listrik, Konstruksi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (BPS, 2021). Melihat sektor yang mengalami pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat dikatakan bahwa klasifikasi maju dan bertumbuh yang diperoleh provinsi ini dikarenakan proses pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan sebagai provinsi baru. Selain itu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan merupakan faktor yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan Utara ialah

memperbaiki kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan sesuai dengan kompetensi dan keahlian (Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2021).

Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang selama tiga tahun terakhir terklasifikasi sebagai provinsi tertinggal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Bangka Belitung berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Bangka Belitung dikarenakan sektor primer andalan provinsi ini adalah pertambangan timah. Bijih timah merupakan sumber daya alam yang paling bernilai di Provinsi Bangka Belitung. Perusahaan BUMN terbesar untuk penambangan bijih timah adalah PT Timah Tbk, dan satu perusahaan asing, PT Koba Tin, dengan luas area Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah Tbk di darat sekitar 360.000 ha atau \pm 35 persen dari luas daratan Pulau Bangka. BUMN ini juga memiliki areal KP darat di Pulau Belitung seluas 126.455 ha atau \pm 30 persen dari luas daratan Pulau Belitung. Untuk PT Koba Tin, diberikan sekitar 41.000 ha. Di luar area kuasa pertambangan PT Timah Tbk dan kontrak karya (KK) PT Koba Tin, kegiatan penambangan juga diusahakan oleh pengusaha tambang inkonvensional dan masyarakat secara tradisional yang juga memberikan nilai ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung (Bappenas, 2015). Eksplorasi timah yang sudah berjalan puluhan tahun menyebabkan berkurangnya produksi timah di provinsi ini (BPS, 2021), hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat mengingat besarnya kontribusi tambang terhadap perekonomian di provinsi Bangka Belitung. Sektor penopang perekonomian Provinsi Bangka Belitung saat ini adalah sektor Industri Pengolahan, Pertanian Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan (BPS, 2021).

Gambar 3. Struktur Ekonomi Provinsi Indonesia pada Tahun 2008-2020



Sumber: Hasil Olahan Penelitian

Gambar 2 menunjukkan klasifikasi provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, terdapat 6 provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi maju dan cepat tumbuh, yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Keenam provinsi ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional serta tingkat pendapatan per kapita di atas rata-rata nasional. Dari keenam provinsi tersebut, sebagian besar pertumbuhan ekonomi yang terjadi ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (BPS, 2021), dimana kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan rata-rata di atas 20 persen. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak begitu terdampak pandemi yang terjadi. Namun hal ini tidak terjadi di Papua dan Papua Barat, dimana sektor penopang pertumbuhan di Papua dan Papua Barat adalah Pertambangan dan Penggalian.

Terdapat empat provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi yang maju namun tertekan pada tahun 2020. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi yang berada di klasifikasi ini Sebagian besar pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor tersier. Provinsi Riau penopang PDRB terbesar merupakan sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi mencapai 41,7 persen di tahun 2020 (BPS, 2021). Provinsi Jakarta sektor penopang PDRB terbesar adalah sektor Perdagangan (16,62 persen), Industri Pengolahan (11,37 persen), Konstruksi dan Jasa Keuangan (masing-masing 11,27 persen) (BPS, 2021). PDRB Provinsi Kalimantan Timur ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (41,43 persen) dan Industri Pengolahan (18,9 persen) (BPS, 2021).

Provinsi-provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi daerah berkembang cepat di tahun 2020 ialah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Provinsi-provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi berkembang cepat berarti provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional, namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam klasifikasi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dan berpotensi menjadi pusat-pusat perekonomian baru. Selama pemerintah bisa mempertahankan laju pertumbuhan perekonomian di provinsi-provinsi tersebut, maka tidak mustahil akan tercipta pusat perekonomian baru di provinsi-provinsi yang berada pada klasifikasi ini. Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang menjaga iklim investasi merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya

Terdapat tujuh provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi tertinggal pada tahun 2020. Provinsi-provinsi tersebut ialah Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Provinsi yang

terklasifikasi sebagai provinsi tertinggal merupakan provinsi yang pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional. Apabila dilihat, banyak provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi tertinggal merupakan provinsi-provinsi yang biasanya menjadi pusat perekonomian. Namun di tahun 2020, terdapat enam provinsi yang mengalami perubahan, dalam hal ini penurunan klasifikasi. Penurunan klasifikasi dari daerah berkembang cepat menjadi daerah tertinggal terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Keenam daerah ini merupakan daerah yang terdampak pandemi secara signifikan.

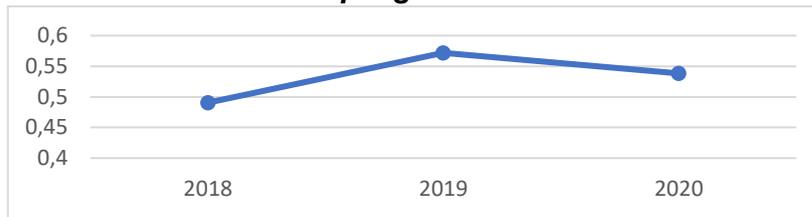
Selain keenam daerah tersebut, terdapat 2 provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi pada tahun 2020. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur, dari daerah maju di tahun 2019 menjadi daerah maju tapi tertekan di tahun 2020. Perekonomian di kedua provinsi ini ditopang oleh sektor-sektor tersier, sehingga kurang *robust* saat terjadi pandemi di tahun 2020. Provinsi yang ditopang oleh sektor tersier cenderung mengalami penurunan klasifikasi daerah di masa pandemi karena adanya perubahan pola konsumsi di masyarakat. Masyarakat cenderung untuk menahan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sektor tersier, misalkan berwisata. Hal ini dikarenakan karakteristik dari penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menyebutkan ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah (Triatmojo, 2021).

Namun di tahun 2020, terdapat sembilan provinsi yang mengalami perubahan klasifikasi. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan mengalami perubahan klasifikasi dari daerah tertinggal menjadi daerah berkembang cepat. PDRB Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 30,98 persen (BPS, 2021), 22,34 persen (BPS, 2021), 28,36 persen (BPS, 2021), dan 23,19 persen (BPS, 2021). Provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi daerah merupakan provinsi-provinsi yang di topang oleh sektor primer. Sektor primer lebih *robust* pada era pandemi dikarenakan produk-produk dari sektor ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat di masa pandemi. Masyarakat membutuhkan produk dari sektor primer guna melangsungkan hidupnya.

4.2. Ketimpangan Provinsi di Indonesia

Ketimpangan pembangunan provinsi-provinsi di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan (Gambar 4). Rata-rata indeks ketimpangan provinsi di Indonesia selama tiga tahun terakhir berada di sekitar 0,5.

Gambar 4. Rata-Rata Ketimpangan Provinsi-Provinsi di Indonesia

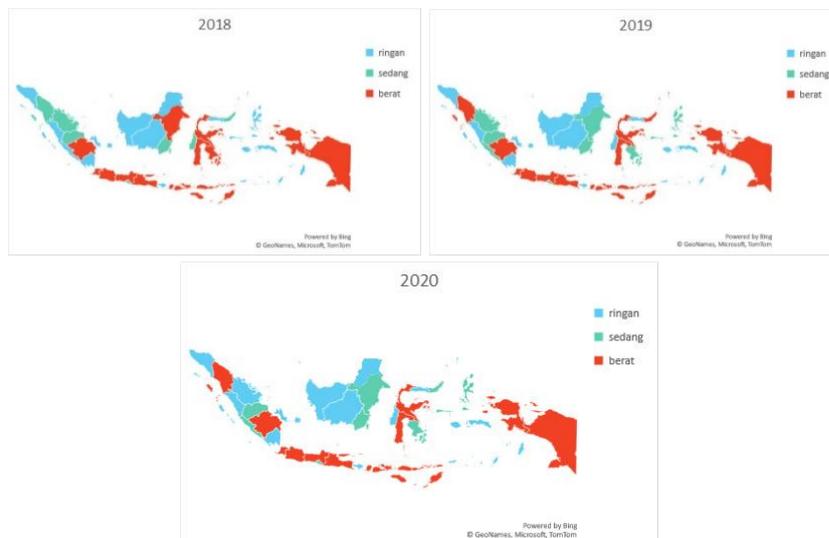


Sumber: Hasil Olahan Penelitian

Apabila dilakukan klasifikasi provinsi-provinsi di Indonesia terkait ketimpangan pembangunan, maka diperoleh bahwa pada tahun 2018 terdapat 12 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan ringan, 8 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan sedang, dan 14 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan berat. Pada tahun 2019, terdapat perubahan jumlah provinsi berdasarkan klasifikasi tingkat ketimpangan pembangunan. Pada tahun 2019, terdapat 11 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan ringan, 9 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan sedang, dan 14 provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan berat. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 12 provinsi dengan tingkat ketimpangan ringan, 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan sedang, dan 12 provinsi dengan tingkat ketimpangan berat. Artinya, selama 3 tahun terakhir 35 persen provinsi di Indonesia mengalami tingkat ketimpangan pembangunan yang berat.

Pada tahun 2019, terdapat 7 provinsi yang mengalami perubahan klasifikasi ketimpangan pembangunan. Pada tahun 2019, terdapat 2 provinsi yang mengalami perubahan klasifikasi dari berat ke sedang, yaitu provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun yang sama, provinsi Sulawesi Barat mengalami perubahan tingkat ketimpangan dari sedang ke ringan. Sedangkan provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara mengalami perubahan klasifikasi dari sedang ke berat. Provinsi Maluku Utara dan Bengkulu mengalami perubahan klasifikasi dari ringan ke sedang.

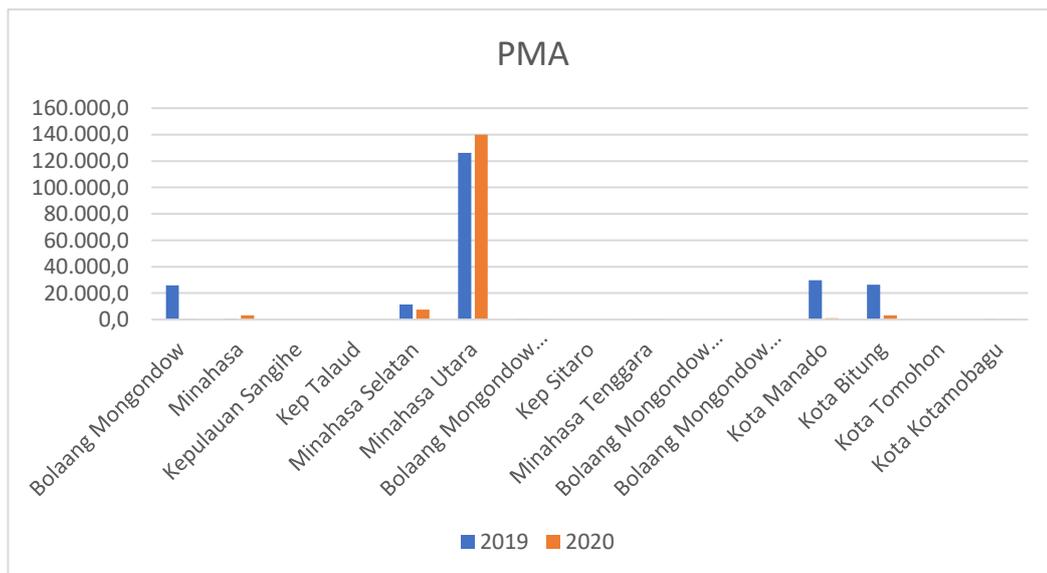
Gambar 5. Indeks Williamson Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: Hasil Olahan Penelitian

Pada tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara mengalami penurunan kategori ketimpangan pembangunan dari berat ke sedang. Penurunan kegiatan pembangunan di tahun 2020 menjadi salah satu penyebab penurunan kategori ketimpangan. Pada tahun 2019, besaran belanja pembangunan di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp18,95 triliun dengan rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran mencapai 29,19 persen. Sedangkan pada tahun 2020, besaran belanja pembangunan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 7,26 triliun, dengan rasio belanja pembangunan terhadap pengeluaran total hanya sebesar 13,94 persen.

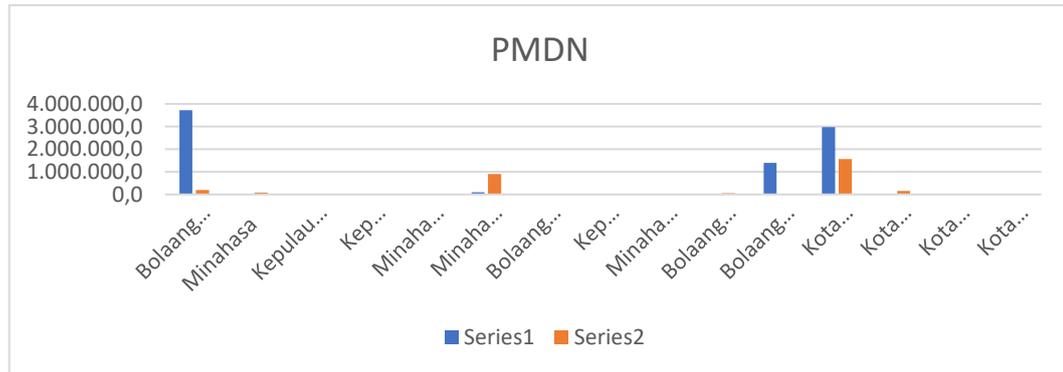
Gambar 6. Perkembangan PMA Provinsi Sulawesi Utara (dalam Ribu USD)



Sumber: BKPM (diolah)

Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Utara ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gambar 7. Pada tahun 2020, di Sulawesi Utara terjadi penurunan realisasi investasi sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Gambar 6 dan 7 juga memperlihatkan bahwa realisasi investasi terjadi hanya di beberapa kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara. Selain adanya penurunan jumlah realisasi investasi, pada tahun 2020, terjadi penyebaran realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya pada tahun ini, lebih banyak daerah, dalam hal ini kabupaten/kota, yang mendapatkan investasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya penurunan klasifikasi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Derek *et al.* (2019) yang menyatakan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara terjadi dikarenakan adanya ketidakmerataan investasi dan pembangunan yang dilaksanakan (Derek, Laoh, & Jocom, 2019).

Gambar 7. Perkembangan PMDN Provinsi Sulawesi Utara (dalam Juta Rupiah)



Sumber: BKPM (diolah)

Tingginya ketimpangan yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia disebabkan adanya perbedaan karakteristik dari wilayah-wilayah tersebut. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam. Menurut Bank Dunia, terdapat empat penyebab utama ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Penyebabnya ialah adanya ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi goncangan (Kemenkeu, 2021).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok berdasarkan pola dan struktur ekonominya. Sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam kategori daerah berkembang cepat. Provinsi ini merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, namun pendapatan per kapitanya berada di bawah rata-rata nasional. Wilayah ini berpotensi menjadi pusat perekonomian baru apabila laju pertumbuhan ekonomi masih dipertahankan. Untuk itu, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang menjaga iklim investasi merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Provinsi-provinsi yang menjadi pusat perekonomian nasional saat ini berada dalam klasifikasi maju tapi tertekan. Hal ini diartikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan pendapatan per kapita di atas rata-rata nasional, namun pertumbuhan yang terjadi berada di bawah rata-rata nasional. Adanya pandemi di tahun 2020 menyebabkan banyak provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi daerah tertinggal, atau wilayah dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi ini merupakan provinsi yang PDRB-nya ditopang oleh sektor tersier. Sedangkan provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi pada

pandemi merupakan provinsi-provinsi yang ditopang oleh sektor primer. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumsi di masyarakat yang lebih menahan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersier. Masyarakat cenderung untuk tidak melakukan kegiatan tersier guna menghindari terpapar virus Covid-19. Selain itu penurunan daya beli masyarakat juga menjadi salah satu penyebab perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ketimpangan yang terjadi di wilayah provinsi di Indonesia masih relatif tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik wilayah, baik kondisi sosial, ekonomi, maupun geografis. Selain itu, penyebab utama ketimpangan yang terjadi di wilayah provinsi di Indonesia ialah adanya ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan.

5.2. Saran

Ketidakmerataan pembangunan dan investasi merupakan salah satu penyebab tingginya ketidakmerataan di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan menjaga iklim investasi di wilayahnya. Apabila wilayah provinsi mengalami kemunduran pada sektor-sektor penopang perekonomian, seperti yang terjadi di provinsi Bangka Belitung, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan sektor-sektor mana yang berpotensi untuk berkembang di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)*. 2020, <https://kaltara.bps.go.id/indicator/52/161/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB (Dengan Tambang) (Persen)*. 2020. <https://papua.bps.go.id/indicator/154/155/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-dengan-tambang-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Prov Sulawesi Tengah. (Persen)*. <https://sulteng.bps.go.id/indicator/52/121/1/-seri-2010-distribusi-pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-berlaku-prov-sulawesi-tengah-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021

- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen) 2020*. <https://jambi.bps.go.id/indicator/52/463/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-adhb-menurut-lapangan-usaha-provinsi-jambi.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) 2020*, <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/52/141/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020*. <https://kepri.bps.go.id/indicator/52/281/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020*. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/52/91/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021.
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/52/60/1/distribusi-pdrb-atas-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Lapangan Usaha Triwulan Provinsi (Persen) 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/156/348/2/distribusi-pdrb-lapangan-usaha-triwulan-provinsi.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulanan (Persen) 2020*. <https://ntb.bps.go.id/indicator/52/350/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-menurut-lapangan-usaha-triwulanan.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha*. <https://babel.bps.go.id/indicator/52/1062/2/-triwulan-distribusi-pdrb-triwulanan-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020*. <https://bengkulu.bps.go.id/indicator/157/207/2/distribusi-persentase-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 2019-2020*, <https://aceh.bps.go.id/indicator/52/227/1/distribusi-persentase-pdrb-seri-2010.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2020*, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/168/1/-seri-2010-distribusi-produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sumatera-barat-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021

- BPS. (2021). *Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (y-o-y) (persen)*. <https://kaltara.bps.go.id/indicator/52/163/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-y-o-y-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Produksi Biji Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id/statictable/2015/06/28/36/produksi-biji-timah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-per-bulan-tahun-2008-2014-ton-sn-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- Bappenas. (2004). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah Direktorat Jendral Pengembangan Otonomi Daerah 1-12*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2015). *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bangka Belitung*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2015). *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*. Jakarta: Bappenas
- BPS. (2020). *Distribusi PDRB Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020*. <https://kaltara.bps.go.id/indicator/52/161/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2020). *Distribusi PDRB (Dengan Tambang) (Persen) 2020*, <https://papua.bps.go.id/indicator/154/155/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-dengan-tambang-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2020). *Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Prov Sulawesi Tengah. (Persen) 2018-2019*, <https://sulteng.bps.go.id/indicator/52/121/1/-seri-2010-distribusi-pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-berlaku-prov-sulawesi-tengah-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2020). *Distribusi PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen) 2020*. <https://jambi.bps.go.id/indicator/52/463/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-adhb-menurut-lapangan-usaha-provinsi-jambi.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) 2020*. <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/52/141/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020*. <https://kepri.bps.go.id/indicator/52/281/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021

- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020*. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/52/91/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021.
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/52/60/1/distribusi-pdrb-atas-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Lapangan Usaha Triwulan Provinsi (Persen) 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/156/348/2/distribusi-pdrb-lapangan-usaha-triwulan-provinsi.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulanan (Persen) 2020*. <https://ntb.bps.go.id/indicator/52/350/2/-seri-2010-distribusi-pdrb-menurut-lapangan-usaha-triwulanan.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha*. <https://babel.bps.go.id/indicator/52/1062/2/-triwulan-distribusi-pdrb-triwulanan-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020*. <https://bengkulu.bps.go.id/indicator/157/207/2/distribusi-persentase-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 2019-2020*. <https://aceh.bps.go.id/indicator/52/227/1/distribusi-persentase-pdrb-seri-2010.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2020*. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/168/1/-seri-2010-distribusi-produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sumatera-barat-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (y-o-y) (persen)*. <https://kaltara.bps.go.id/indicator/52/163/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-y-o-y-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- BPS. (2021). *Produksi Biji Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id/statictable/2015/06/28/36/produksi-biji-timah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-per-bulan-tahun-2008-2014-ton-sn-.html>, diakses pada 17 Oktober 2021
- Kemenkeu. (2021). *Empat Penyebab Ketimpangan di Indonesia Versi Bank Dunia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/empat-penyebab-ketimpangan-di-indonesia-versi-bank-dunia/>, diakses pada 17 Oktober 2021

- Kemenkeu. (2021). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>, diakses pada 17 Oktober 2021
- Kiton, Mario Andrias. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Smart. Volume III No.2.
- Khusaini, Muhamad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFU Unbraw.
- Last, G. (2007). *A Summary of Economic Development Terms - 2nd Edition*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mankiw. (2000). *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nehen, I Ketut, (2010). *Perekonomian Indonesia. Diktat Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Bali
- Park, Hun Myoung. (2008). *Univariate Analysis and Normality Test Using SAS, Stata, and SPSS*. Bloomington: The Trustees of Indiana University.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (2021). *Pemprov Bertekad Tingkatkan Kualitas Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah*. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pemprov-bertekad-tingkatkan-kualitas-pengawasan-akuntabilitas-keuangan-dan-pembangunan-daerah/>, diakses pada 17 Oktober 2021
- Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- . (2013). *Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: Wadsworth Cengage Learning
- Sultan, Jamzani. (2010). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Periode 2000-2004*. *Buletin Ekonomi Vol.8 No.1*, hal.1-70
- Sutarno dan Kuncoro M. (2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2003*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No.2*. hal. 97-110
- Suhartanto, D. (2005). *Orientasi Pasar di Sekolah Pendidikan : Sebuah Kajian Teoritis*. *Jurnal Pendidikan No. 1, Th. XXIV*.
- Syamsul. (2020). *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018*. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 05 No. 01*. Hal. 47-66

- Thamrin Simanjuntak. (2001). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Penerbit UPP AMP YKPN.
- Tikson, D. T. (2005). *Indikator-Indikator Pembangunan Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Todaro, (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi ketujuh)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. 9 ed. Jakarta: Erlangga.